

PENJELASAN AGENDA RUPS

Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Perseroan”) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2016, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily:

- Pemberitahuan mengenai rencana RUPST pada tanggal 11 April 2016;
- Panggilan atau Undangan menghadiri RUPST pada tanggal 26 April 2016.

Selanjutnya dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan.

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap agenda RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

1. a. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;**
b. **Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan**
c. **Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;**

Latar Belakang:

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 Ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang mana laporan pengurusan Direksi, laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris terdapat dalam Laporan Tahunan harus disampaikan dalam RUPST.

Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Laporan Tahunan Direksi Perseroan

Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Dinamika perekonomian di tingkat global telah memberikan dampak negatif bagi situasi perekonomian nasional, yang pada akhirnya berimbas terhadap dunia usaha, termasuk di industri pembiayaan.

Kondisi makro ekonomi yang kurang menguntungkan memberikan tekanan kepada dunia usaha, termasuk di dalamnya industri kendaraan bermotor. Daya beli masyarakat yang rendah, ditambah dengan biaya produksi yang meningkat akibat pelemahan kurs Rupiah dan suku bunga tinggi, sehingga turut menekan industri.

Dalam situasi seperti itu, Perusahaan mengedepankan strategi “Efisiensi, Efektivitas, dan Optimalisasi.” Didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang inovatif serta dukungan teknologi informasi, Perusahaan menghadapi situasi yang berkembang dengan percaya diri. Inisiatif strategis yang diimplementasikan oleh Perusahaan pada tahun 2015, antara lain diulas pada pembahasan berikut ini.

Sepanjang tahun 2015, Perusahaan telah menyalurkan pembiayaan atas 1,7 juta kontrak baru, dimana 90% atau 1,5 juta unit adalah motor, 6% atau 111 ribu unit adalah mobil dan sisanya adalah untuk barang rumah tangga (durables) yang merupakan bagian dari strategi untuk menawarkan layanan “one-stop solution” bagi konsumen.

Total pembiayaan baru Adira Finance hanya turun sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp34,1 triliun menjadi Rp30,5 triliun. Karena itu, kontribusi pembiayaan untuk kendaraan bekas meningkat sekitar 38% pada 2015 dari 32% pada tahun sebelumnya.

Kami juga membukukan pertumbuhan pembiayaan syariah sebesar 90% menjadi Rp4,5 triliun, yang memberi kontribusi 15% pada pembiayaan baru pada tahun 2015.

Untuk tahun fiskal 2015, pendapatan bunga mencapai Rp9.033 miliar, naik 4% dibandingkan dengan Rp8.660 miliar pada tahun fiskal 2014. Kami membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp3.824 miliar pada 2015.

Laba Bersih setelah Pajak turun dari Rp792 miliar pada 2014 menjadi Rp665 miliar pada 2015, terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya perolehan dana dan berkurangnya aktivitas penyaluran pembiayaan.

Pada 31 Desember 2015, piutang pembiayaan yang kami kelola, termasuk pembiayaan dalam skema joint financing serta biaya akuisisi, tercatat sebesar Rp46.4 triliun. Penurunan ini terutama didorong oleh melambatnya laju pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru sebesar 10%.

Dengan melakukan berbagai inisiatif untuk menjaga NPL, kami berhasil menjaga tingkat NPL di angka 1,7%. Kenaikan NPL ini tidak dapat dihindari karena kondisi ekonomi Indonesia yang terus mengalami perlambatan.

Untuk mendukung kegiatan penyaluran kredit, Kami memiliki beberapa sumber pendanaan: pembiayaan bersama (JF) dengan bank induk, menerbitkan obligasi-sukuk dan pinjaman bank baik itu dari dalam maupun luar negeri.

Kami bersyukur bahwa dalam kondisi perekonomian yang kurang kondusif ini, peringkat Pefindo Adira Finance untuk Perusahaan (*corporate*) maupun obligasi (*bonds*) tetap dapat kita pertahankan di peringkat AAA, dengan stable outlook. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan Perusahaan yang tinggi di kalangan komunitas finansial.

Pada tahun 2015, bidang operasional lebih fokus pada perbaikan portofolio pembiayaan. Peningkatan kualitas portofolio kredit lebih diutamakan dibandingkan peningkatan secara kuantitas, mengingat situasi perekonomian sedang penuh tantangan. Pada saat bersamaan, Perusahaan juga menjaga hubungan dengan nasabah lebih intensif agar relasi positif tetap terjaga dengan baik.

Perusahaan senantiasa menempatkan SDM sebagai faktor yang sangat penting dalam menunjang setiap proses bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, Perusahaan memberikan perhatian yang besar terhadap SDM, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan talenta.

Untuk tahun 2015, berbagai kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Adira Finance untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sejalan dengan terbitnya beberapa regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan.

Sebab bagi Perusahaan, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sudah menyatu dalam proses bisnis yang dijalankan. Sejak dari perencanaan hingga eksekusi dan evaluasi, selalu dibatasi oleh pengelolaan manajemen risiko, yang pada beberapa hal tertentu justru ditingkatkan.

Hal lain yang membuat Perusahaan semakin bangga adalah prestasi yang berhasil diraih dalam ajang Annual Report Award 2014 yang diadakan pada tanggal 22 September 2015, dimana Perusahaan berhasil meraih pemenang peringkat III untuk kategori Private Keuangan Listed.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan mengadopsi mekanisme yang bertumpu pada 4 pilar, yaitu: (1) melakukan pengawasan aktif; (2) menyusun kebijakan dan penerapan batasan; (3) melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan dan sistem informasi manajemen; dan (4) menerapkan pengendalian internal terkait keuangan dan operasional.

Perusahaan telah menjalankan kebijakan tanggung jawab sosial dengan mengacu pada regulasi yang sudah ada, baik yang termaktub Undang-Undang Perusahaan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maupun regulasi lainnya. Pada intinya, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diamanatkan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Berlandaskan pada prinsip tersebut, Perusahaan merealisasikan tanggung jawab itu dengan konsep “Creating Shared Value.” Karena itu, Perusahaan bukan sekadar menyalurkan dana dalam bentuk bantuan, tetapi lebih dari itu, memberdayakan komunitas atau pemangku kepentingan terutama konsumen, dalam arti yang sesungguhnya.

Ditahun 2016, Adira Finance telah menetapkan target penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp35-36,6 triliun. Target tersebut tentunya akan kembali ditinjau pada akhir semester I-2016, agar dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan usaha. Ke depannya, Perseroan akan terus menerapkan pertumbuhan secara hati-hati dengan tujuan mempertahankan kualitas aset yang sehat, dan di saat yang bersamaan, memfokuskan diri memanfaatkan produk dengan imbal hasil yang lebih besar, memperoleh dana dengan biaya dapat ditekan seoptimal mungkin, di samping memperdalam hubungan dengan pelanggan dan dealer dan meningkatkan proses dan efisiensi.

Sepanjang tahun 2015, Perusahaan tidak mengalami perubahan komposisi Direksi, hanya saja untuk memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia, maka pada RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 21 Mei 2015 salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Independen.

Laporan rinci ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perusahaan

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Pada tahun 2015, Perusahaan menghadapi berbagai tantangan terkait kegiatan usaha mau pun lingkungan usaha. Kondisi perekonomian, baik di tingkat global maupun domestik kurang mendukung kegiatan bisnis Perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 tumbuh 4,8%, melemah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu sekitar 5%. Daya beli masyarakat juga menurun seiring penurunan pertumbuhan ekonomi. Penjualan motor baru di Indonesia turun signifikan sekitar 18% dari 7,9 juta unit di tahun 2014 menjadi 6.5 juta unit di tahun 2015, sementara penjualan mobil baru juga turun sekitar 16% di tahun 2014 menjadi 1 juta unit di tahun 2015.

Meskipun kondisi ekonomi kurang kondusif, Direksi mampu mempertahankan kinerja Perusahaan dengan baik di tahun 2015, serta berhasil mengatasi berbagai tantangan secara cepat dan tepat. Oleh karenanya, Perusahaan tetap dapat membukukan pendapatan yang cukup baik.

Pada tahun 2015, pembiayaan kendaraan bermotor bekas memberikan kontribusi sekitar 38%, dibandingkan kontribusi tahun lalu sebesar 32%. Akibatnya, total pembiayaan baru yang dibukukan Perusahaan menurun lebih sedikit dibandingkan dengan industri. Secara keseluruhan, pembiayaan baru Perusahaan mengalami penurunan sekitar 10% dari Rp34,1 triliun menjadi Rp30,5 triliun di tahun 2015.

Pada tahun buku 2015, Perusahaan berhasil mempertahankan tingkat NPL sebesar 1,7%. Selain itu, Perusahaan berhasil mencatat pendapatan bunga sebesar 4% menjadi Rp9,0 triliun di tahun 2015. Laba bersih setelah pajak Perusahaan tercatat sebesar Rp665 miliar, lebih rendah dari tahun 2014 sebesar Rp792 miliar.

Untuk mendukung pendanaannya, Perusahaan terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan melalui pembiayaan bersama (joint financing) dengan perusahaan induk, penerbitan obligasi, dan pinjaman bank baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk memperoleh pinjaman bank dari luar negeri, Perusahaan telah melakukan lindung nilai (*hedging*) atas seluruh fasilitas pinjaman termasuk hutang pokok dan suku bunganya. Kebijakan ini terbukti efektif untuk melindungi risiko mata uang, terutama ketika nilai tukar Rupiah mengalami gejolak.

Selama tahun 2015, Perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif yang tepat untuk mengurangi dampak dari penurunan pendapatan. Beberapa langkah telah menunjukkan hasil, terutama dalam memperbaiki produktifitas dan mengurangi biaya operasional.

Dewan Komisaris memandang bahwa target yang ditetapkan manajemen sesuai dengan prospek bisnis tahun 2016. Kami berharap perekonomian Indonesia akan membaik melalui dorongan belanja pemerintah, terutama melalui berbagai proyek infrastruktur and tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga dapat memperbaiki sentiment dan pengeluaran konsumen.

Kedepan, Perusahaan dihadapkan pada persaingan yang terus meningkat, terutama jika permintaan konsumen untuk motor dan mobil tidak mengalami peningkatan.

Direksi beserta tim manajemen telah menyiapkan sejumlah inisiatif untuk mendukung pencapaian target finansial di tahun 2016. Beberapa inisiatif mencakup peningkatan hubungan dengan dealer dan nasabah, memperkuat sinergi dengan perusahaan induk (Bank Danamon) melalui kolaborasi dan *cross-selling* produk, menjaga kualitas asset, serta mengelola biaya secara efektif.

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Beberapa inisiatif telah dilakukan terkait pengembangan GCG. Hal tersebut mencakup Penilaian mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan berdasarkan kriteria Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) serta Penilaian mandiri berdasarkan kriteria Bank Indonesia yang telah disesuaikan untuk perusahaan pembiayaan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih obyektif terhadap penerapan kualitas GCG, Perusahaan juga dinilai secara independen oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), menggunakan standar internasional dan ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Dewan Komisaris dibantu oleh empat komite, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola. Sepanjang tahun 2015, komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas terkait fungsi pemantauan dan penyediaan pengawasan yang diperlukan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan Perusahaan difokuskan untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan serta berbagai inisiatif yang memberikan manfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Dewan Komisaris senantiasa mendukung upaya manajemen untuk merealisasikan tanggung jawab sosial perusahaan melalui konsep “Creating Shared Value” dengan memberdayakan komunitas atau pemangku kepentingan, terutama konsumen kami.

Susunan anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 Mei 2015 terdiri dari:

Komisiaris Utama	:	Sng Seow Wah
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Djoko Sudyatmoko
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Pande Radja Silalahi
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Eng Heng Nee Philip
Komisaris	:	Loh Niap Juan
Komisaris	:	Vera Eve Lim

Pande Raja Silalahi meninggal dunia pada 2 Oktober 2015. Dewan Komisaris menyampaikan belasungkawa serta menyampaikan penghargaan atas sumbangsih beliau kepada Perusahaan.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ho Hon Cheong dan Muliadi Rahardja atas dedikasi dan kontribusinya bagi Perusahaan. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada anggota Dewan Komisaris yang baru, Sng Seow Wah dan Loh Niap Juan.

Dewan Komisaris menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Direksi, manajemen, dan seluruh staf Perusahaan yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada konsumen kami, pemegang saham, dan seluruh regulator atas kepercayaan yang telah diberikan serta dukungan yang tiada henti bagi Perusahaan.

Laporan Rinci atas penjelasan ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perusahaan

Data/ Materi Pendukung:

- Laporan Tahunan Perseroan dapat diunduh pada website Perseroan dan telah tersedia di kantor pusat Perseroan. Laporan Tahunan 2015 Perseroan antara lain juga memuat Laporan Keuangan untuk tahun buku 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Latar Belakang:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, Laba Bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Laba Bersih Perseroan di akhir tahun 2015 setelah pajak mencapai Rp 665 miliar.

Melalui RUPS Tahunan yang diadakan pada tahun 2016 ini, Direksi Perseroan akan mengusulkan penggunaan 50% Laba Bersih Perseroan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Penggunaan Laba Bersih Perseroan tersebut telah mempertimbangkan kinerja Perseroan, kecukupan modal dan apresiasi Perseroan terhadap dukungan para pemegang saham.

Selain untuk dividen, Perseroan akan mengusulkan penyisihan cadangan wajib Perseroan sebesar 1% dari Laba Bersih guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT. Sisa Laba Bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai Laba Ditahan. Sedangkan sisa Laba Bersih Perseroan yaitu sebesar Rp 325,85 miliar yang belum ditentukan penggunaannya, dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Data/Materi Pendukung:

Pengungkapan Laba Bersih Perseroan dapat diakses lebih lanjut pada Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015.

3. Penerapan standar akuntansi baru yaitu: PSAK No. 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dan implikasinya;

Latar Belakang:

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diatur lebih lanjut dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (“DSA-IAI).

Bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan Laporan Keuangan Perseroan dan mendorong terciptanya Good Corporate Governance, ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan perlu disesuaikan sesuai dengan perkembangan PSAK.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;

Latar Belakang:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPT juncto Pasa 18 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa. Peraturan OJK (dahulu Bapepam-LK) No. VIII.A.2. Tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal mengatur mengenai prosedur dan persyaratan pemilihan Akuntan Publik dan membatasi periode penugasan yaitu paling lama 6 (enam) tahun buku terhadap satu Kantor Akuntan Publik dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut terhadap seorang Akuntan. Selanjutnya Pasal 20 Ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa pengangkatan akuntan publik, honorarium dan persyaratan pengangkatan dilakukan melalui RUPS. Sedangkan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS.

Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah Benyanto Suherman dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global Limited. Masa penugasan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dari Kantor Akuntan Publik tersebut telah dilakukan tiga kali atau berlangsung selama 5 (lima)) tahun berturut-turut.

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2016, Komite Audit Perseroan telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global Limited, untuk melakukan audit/ pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku 2016. Rekomendasi ini telah diterima Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPST.

5. a. **Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;**
- b. **Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;**
- c. **Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;**

Latar Belakang:

Sesuai dengan Pasal 17 Ayat 6 dan Pasal 20 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 dan Pasal 96 UUPT, RUPST menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi, gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris menerima rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan akan mengusulkan kepada RUPST:

- Untuk penentuan gaji dan tunjangan dan/atau pendapatan lain dari anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun 2016 adalah sebesar Rp 37.085.637.790, sedangkan untuk tantiem anggota Direksi untuk tahun buku 2015 adalah sebesar Rp 14.167.333.774
- Untuk penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.859.328.836, sedangkan termasuk tantiem untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 adalah sebesar Rp 367.642.800.
- Untuk penentuan honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

Latar Belakang:

- Pada tanggal 2 Oktober 2015, salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Pande Radja Silalahi meninggal dunia;
- Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, khususnya ketentuan Pasal 24 salah satu persyaratan sebagai Komisaris Independen adalah berkewarganegaraan Indonesia, sehingga anggota Komisaris Independen yang berkewarganegaraan asing berubah menjadi Komisaris biasa;
- Perseroan telah menerima pengajuan calon Komisaris Independen yang baru yaitu atas nama Krisna Widjaja.

Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Dalam RUPS akan diusulkan:

- a. merubah jabatan Eng Heng Nee Philip dari jabatan sebelumnya Komisaris merangkap Komisaris Independen menjadi Komisaris;
- b. menyetujui pengangkatan Krisna Widjaja sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah lulus fit and proper OJK.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama: Sng Seow Wah

Komisaris merangkap Komisaris Independen: Djoko Sudyatmiko (*)

Komisaris merangkap Komisaris Independen: Krisna Widjaja (**)

Komisaris: Eng Heng Nee Philip

Komisaris: Vera Eve Lim

Komisaris: Loh Niap Juan

Keterangan:

(* Komisaris Independen sesuai ketentuan sebagai perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.

(** Komisaris Independen sesuai ketentuan sebagai perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/POJK.05/2014 dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan sebagai perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014. Efektif setelah lulus fit and proper OJK .

Data/Materi Pendukung:

Profil calon anggota Dewan Komisaris baru dapat diakses pada website Perseroan.

7. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;

Latar Belakang:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Anggaran Dasar Adira Finance “Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain wajib mendapatkan persetujuan RUPS”.

Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Penambahan sumber pendanaan dari luar Perseroan maupun Grup tetap akan diperlukan untuk mendukung perkembangan usaha pembiayaan Perseroan, sumbernya merupakan kombinasi dari pinjaman perbankan (baik perbankan dalam negeri maupun luar negeri), penerbitan obligasi dan sumber pendanaan lainnya. Per 31 Maret 2016, sumber pendanaan dari *external* telah mencapai lebih dari Rp19,7triliun dan jumlah aset yang dijamin mencapai sekitar Rp 9,4triliun.

Untuk kondisi saat ini, jaminan yang diberikan perusahaan adalah berbentuk fidusia atas piutang pembiayaan konsumen, dengan nilai penjaminan bervariasi antara 50%-100% dari nilai pokok pinjaman dengan asumsi rata-rata pinjaman memerlukan jaminan senilai 60% dari pokok pinjaman.

Selain pendanaan yang berasal dari pinjaman perbankan dan pasar modal, Perseroan juga mendapatkan pendanaan dari joint financing dan asset sales yang juga akan memerlukan pengalihan harta kekayaan Perseroan berupa piutang pembiayaan.

Dengan demikian dalam tahun 2016, jumlah harta kekayaan Perseroan yang akan menjadi jaminan dan dialihkan dalam rangka joint financing dan asset sales akan mencapai lebih dari 50% dari harta kekayaan (*Asset*) Perseroan pada akhir Desember 2016, yang mencapai Rp4,36 Triliun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Anggaran Dasar Adira Finance “Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain wajib mendapatkan persetujuan RUPS”.

Usulan dari agenda RUPS ini adalah:

1. memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan berupa piutang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) akan tetapi tidak boleh melebihi 400% (empat ratus enam puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan bahwa:
 - a. aset pembiayaan bersama (*join financing*) antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak termasuk di dalam aset yang dijamin;
 - b. Gearing Ratio tidak boleh melebihi 6,5 x (enam koma lima kali) dari jumlah kekayaan bersih berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan ketentuan apabila Gearing Ratio telah mencapai 6 x (enam kali) dari jumlah kekayaan bersih, maka Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas.
 2. bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan dan syarat yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga; dan
 3. memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan piutang/tagihan Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan Notaris.
- 8. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014.**

Latar Belakang:

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya ketentuan dalam Pasal 7, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS Tahunan terdekat.

Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Pada tahun 2015 dan sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan, Adira Finance telah menerbitkan:

- a. Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 dengan nilai total Rp 979 miliar, seluruh hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya, dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor dan laporan

penggunaan dana hasil penawaran umum telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 Juli 2015;

- b. Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 dengan nilai total Rp 1.437 miliar, seluruh hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya, dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor dan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 14 September 2015;
- c. Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 dengan nilai total Rp 1.101 miliar, seluruh hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya, dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor dan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 24 Maret 2016; dan
- d. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dengan nilai total Rp 500 miliar, seluruh hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya, dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor dan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 Juli 2015.

Agenda ini sifatnya adalah pelaporan saja.